

Panduan

Penyelenggaraan *Digital Branch* oleh Bank Umum



Desember 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
Bab I Pendahuluan	1
Bab II <i>Digital Branch</i>	3
Bab III Panduan Penyelenggaraan <i>Digital Branch</i>	5
A. Persyaratan, Tata Cara, dan Prosedur Pembukaan/ <i>Penyelenggaraan Digital Branch</i>	5
B. Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi	8
C. Proses Bisnis Registrasi dan Pembukaan Rekening Nasabah.....	9

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, layanan yang disediakan Bank mengalami evolusi yang mengarah kepada layanan perbankan digital (*Digital Banking*). Layanan ini lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi digital melalui perangkat (*device*) dan aplikasi (*software*) sebagai *delivery channel*. Selain itu, layanan perbankan digital dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta meminimalkan interaksi secara langsung dengan pegawai Bank. Hal ini bertujuan juga untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Bank kepada nasabahnya.

Selaras dengan hal tersebut di atas, Bank perlu mengembangkan strategi bisnis yang mengarah kepada layanan perbankan digital yang memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain serta melakukan transaksi selain produk perbankan, antara lain nasihat keuangan (*financial advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*), dan kebutuhan lainnya dari nasabah Bank.

Pengembangan strategi bisnis yang mengarah kepada layanan perbankan digital memerlukan infrastruktur yang memadai antara lain manajemen risiko, penyesuaian teknologi informasi, *business model*, *business process*, *internal control*, dan sumber daya manusia, untuk mendukung kenyamanan, keamanan, serta kehandalan layanan perbankan digital dalam penyediaan informasi, komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, pemrosesan transaksi, dan penutupan rekening.

Dengan mempertimbangkan kesiapan Bank maka penerapan layanan perbankan digital di Indonesia diawali dengan penyelenggaraan "*digital branch*", yaitu adanya sarana Bank yang berfungsi secara khusus untuk memproses registrasi nasabah dan pembukaan rekening secara mandiri.

BAB I PENDAHULUAN

Teknologi Informasi (TI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional Bank mengingat perannya yang sangat vital dalam kegiatan perbankan. Menyadari pentingnya peranan TI dan semakin ketatnya kompetisi antar bank maka Bank dari waktu ke waktu senantiasa menyempurnakan penggunaan TI sehingga perkembangannya cukup dinamis. Awalnya TI digunakan sebagai sarana pendukung sebagian operasional Bank, namun saat ini TI menjadi salah satu bagian utama Bank untuk mendukung hampir seluruh layanan Bank sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah.

Layanan perbankan berbasis TI yang umumnya dikenal sebagai *electronic banking* (*e-banking*), memudahkan nasabah untuk melaksanakan transaksi keuangan melalui berbagai *delivery channel* antara lain *Automatic Teller Machine* (ATM), *Electronic Data Capture* (EDC), *internet banking*, *Short Messaging Service* (SMS) *banking*, *phone banking*, maupun *mobile banking*.

Perkembangan *e-banking* diawali dengan pembukaan ATM yang memiliki fungsi utama untuk penarikan tunai. Selanjutnya diikuti dengan penyelenggaraan EDC yang berfungsi melayani transaksi pembayaran nasabah. Seiring dengan perkembangan jaringan *internet*, *e-banking* bertambah dengan adanya layanan *internet banking* yang dapat diakses melalui komputer oleh nasabah.

Selanjutnya dengan adanya perkembangan penggunaan telepon seluler yang cukup pesat, hal ini mendorong Bank untuk menyediakan layanan *phone banking* dan *SMS banking* bagi nasabah. Layanan ini pada dasarnya memanfaatkan fitur suara, serta pengiriman dan penerimaan teks SMS yang terformat, sehingga dapat dimengerti oleh sistem Bank. Selanjutnya, berkembangnya teknologi jaringan komunikasi data melalui telepon seluler (GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, 4G) dan perangkat *smartphone* (iOS, Android, Windows) dimanfaatkan Bank untuk menyediakan layanan *mobile banking*.

Layanan *mobile banking* memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan layanan *e-banking* lainnya. Mengingat *mobile banking* dapat digunakan di mana saja dan kapan saja dengan fitur yang beragam, mulai dari transaksi pembayaran, pembelian, transfer, hingga penarikan tunai tanpa kartu di mesin ATM.

Meningkatnya transaksi melalui *mobile banking channel*, berdampak pada penurunan jumlah transaksi yang dilakukan nasabah melalui ATM dan kantor cabang. Hal ini menunjukkan adanya perubahan perilaku dan kebiasaan nasabah yang mulai mengarah kepada transaksi *e-banking* melalui perangkat digital yang memberikan kemudahan bagi nasabah.

Seiring dengan perkembangan TI yang begitu cepat dan perubahan perilaku, kebutuhan nasabah juga terus meningkat sehingga mendorong perbankan untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya. Saat ini, perbankan mulai meningkatkan layanannya agar nasabah dapat memperoleh berbagai layanan perbankan secara mandiri (*self-service*) tanpa harus mendatangi kantor bank. Layanan perbankan secara mandiri antara lain melakukan registrasi, transaksi (tunai, transfer, pembayaran) dan berbagai layanan lainnya, hingga penutupan rekening yang dikenal juga dengan istilah layanan perbankan digital (*digital banking*). Perkembangan layanan perbankan digital didorong oleh hal-hal sebagai berikut:

1. adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat;
2. perubahan gaya hidup masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi;
3. adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang efektif, efisien, dapat diakses dari manapun dan kapanpun, komprehensif, serta mudah;
4. kompetisi industri perbankan untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
5. kebutuhan perbankan terhadap operasional yang efisien dan terintegrasi.

BAB II

DIGITAL BRANCH

Layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik Bank, dan/atau melalui media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah Bank, yang dilakukan secara mandiri. Hal ini memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan (*financial advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*), dan kebutuhan lainnya dari nasabah Bank.

Dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital di Indonesia, sangat penting bagi semua pihak untuk meyakini kehandalan faktor keamanan (*security*) transaksi layanan perbankan digital guna memperoleh kepercayaan (*trust*) semua pihak terutama nasabah terhadap layanan perbankan digital tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka antara lain diperlukan kepastian terkait keabsahan data nasabah layanan perbankan digital, melalui pemanfaatan data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Dengan mempertimbangkan kesiapan Bank maka penerapan layanan perbankan digital di Indonesia diawali dengan penyelenggaraan “*digital branch*”, yaitu adanya sarana Bank yang berfungsi secara khusus untuk memproses registrasi nasabah dan pembukaan rekening secara mandiri.

Penyelenggaraan *digital branch* dapat melalui penyediaan beberapa jenis media digital pada area khusus di jaringan kantor Bank ataupun lokasi lain, yang dapat digunakan secara mandiri oleh calon nasabah dan/atau nasabah layanan perbankan digital tanpa melibatkan pegawai Bank. Media digital yang ada pada *digital branch* antara lain dapat berupa:

1. Perangkat keras seperti layar monitor, *tablet* yang berfungsi untuk menyediakan berbagai informasi awal mengenai layanan perbankan digital, tata cara dan prosedur pembukaan rekening, informasi produk, suku bunga, himbauan, dan lain-lain yang bersifat umum yang bisa dibaca oleh calon nasabah dan/atau nasabah.
2. Papan ketik (*keyboard*), termasuk yang dioperasikan menggunakan layar sentuh (*touchscreen*), untuk memasukkan data dan perintah.
3. Mesin pembaca KTP-el yang dilengkapi dengan pemindai sidik jari, yang berfungsi sebagai sarana untuk membaca data dan validasi data kependudukan KTP-el.
4. Perangkat keras yang berfungsi sebagai alat pemindai untuk merekam gambar KTP-el pada saat pembacaan data KTP-el oleh mesin pembaca KTP-el dan foto wajah calon nasabah.
5. Kamera, *microphone*, *speaker*, dan layar video untuk berkomunikasi secara audio visual dengan pegawai Bank (*video banking*).

6. Papan tanda tangan elektronik dan *stylus pen* untuk merekam tanda tangan calon nasabah.
7. *Cash Deposit Machine* (CDM) yang berfungsi sebagai sarana untuk menerima setoran tunai nasabah atau calon nasabah.
8. Perangkat keras yang berfungsi sebagai alat untuk mencetak kartu.
9. *Dispenser* kartu otomatis.
10. EDC untuk membaca kartu dan memasukkan *Personal Identification Number* (PIN).
11. ATM untuk melayani transaksi keuangan (antara lain tarikan dan setoran tunai, transfer, pembayaran) dari rekening giro atau tabungan termasuk *top up* uang elektronik.
12. Kamera untuk merekam aktivitas nasabah atau calon nasabah di *digital branch*.
13. Alat lainnya sesuai kebutuhan Bank.

Penyelenggaraan *digital branch* harus memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, prinsip-prinsip pengamanan TI, integrasinya sistem TI, *cost effectiveness*, dan perlindungan nasabah yang memadai, serta searah dengan strategi bisnis Bank.

BAB III

PENYELENGGARAAN *DIGITAL BRANCH*

Bank yang menyelenggarakan *digital branch*, secara prinsip tetap menerapkan seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan prinsip kehati-hatian, antara lain Manajemen Risiko, Manajemen Risiko Teknologi Informasi, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), serta kelembagaan, kecuali yang diatur secara khusus dalam panduan ini.

Dalam rangka penyelenggaraan *digital branch*, selain memenuhi seluruh ketentuan tersebut di atas, Bank juga harus memenuhi:

A. Persyaratan, Tata Cara, dan Prosedur Penyelenggaraan/Pembukaan *Digital Branch*

1. Persyaratan

- a. Bank mencantumkan rencana penyelenggaraan/pembukaan *digital branch* dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
- b. Berdasarkan hasil penilaian posisi terakhir oleh pengawas, Bank memiliki modal inti paling sedikit memenuhi kriteria sebagai Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 2.
- c. *Electronic banking* yang akan diterapkan oleh Bank pada *digital branch* telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- d. Bank memiliki modal inti sesuai dengan persyaratan pemenuhan kewajiban Alokasi Modal Inti (AMI) untuk penyelenggaraan/pembukaan jenis *digital branch* sesuai dengan ketentuan mengenai Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
- e. Selain syarat tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan pembukaan jaringan kantor sebagaimana diatur dalam ketentuan kelembagaan mengenai Bank Umum atau Bank Umum Syariah, dan ketentuan mengenai Kegiatan Usaha dan Pembukaan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

2. Jenis *Digital Branch*

- a. Kantor Cabang Pembantu Digital yaitu *digital branch* yang setara Kantor Cabang Pembantu dan secara fisik berdiri secara tersendiri, dengan cakupan layanan yang bersifat digital setara dengan layanan Kantor Cabang Pembantu sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Kantor Kas Digital yaitu *digital branch* yang setara dengan Kantor Kas dan secara fisik berdiri secara tersendiri, dengan cakupan layanan yang bersifat digital setara dengan layanan Kantor Kas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dapat melakukan pengumpulan (*collecting*) data/informasi permohonan kredit.

- c. Gerai Digital yaitu *digital branch* yang secara fisik menyatu dengan kantor Bank (Kantor Pusat/ Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Kas/ Kantor Fungsional), dengan cakupan layanan yang bersifat digital setara dengan layanan kantor tempat lokasi keberadaan *digital branch*. Dalam hal Gerai Digital menyatu dengan Kantor Pusat atau Kantor Cabang, cakupan layanan bersifat digital setara dengan layanan Kantor Cabang Pembantu.
- d. Khusus bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, jenis *digital branch* yang diperbolehkan hanya setara kantor kas atau gerai dari Bank yang bersangkutan.

3. Tata Cara dan Prosedur

- a. Pengajuan penyelenggaraan/pembukaan *digital branch* mengacu pada tata cara pembukaan kantor sesuai dengan jenis jaringan kantor sebagaimana diatur dalam ketentuan kelembagaan mengenai Bank Umum atau Bank Umum Syariah dan aturan pelaksanaannya.
- b. Bank menyampaikan permohonan penyelenggaraan/pembukaan *digital branch* kepada OJK (cq. Satuan Kerja Pengawasan Bank terkait) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan penyelenggaraan/pembukaan *digital branch*.
- c. Pengajuan permohonan penyelenggaraan/pembukaan *digital branch* dilampiri dengan data atau informasi sesuai dengan tata cara pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan disertai dengan tambahan data atau informasi pendukung berupa:
 - 1) struktur organisasi yang mendukung termasuk pengawasan dari pihak manajemen;
 - 2) kebijakan, sistem, prosedur, dan kewenangan dalam penyelenggaraan *digital branch*;
 - 3) *cost and benefit analysis*;
 - 4) informasi mengenai jenis dan jumlah perangkat keras (seperti layar monitor, mesin pembaca KTP-el, perangkat keras yang berfungsi sebagai alat untuk meng-*capture image* fisik KTP-el, perangkat keras yang berfungsi sebagai sarana bagi nasabah untuk melakukan registrasi dan meng-*input* data tambahan calon nasabah, perangkat *Video Banking*, CDM, ATM, perangkat keras yang berfungsi sebagai alat untuk mencetak kartu, serta perangkat komputer untuk mengakses *internet banking* dan pengisian *digital form* pengajuan aplikasi kredit);
 - 5) *layout* ruangan;
 - 6) bagan alur proses (*flowchart*) bisnis (antara lain registrasi dan pembukaan rekening nasabah *digital branch* serta prakiraan waktu penyelesaiannya);
 - 7) hasil analisis (*digital readiness assessment*) terhadap kesiapan infrastruktur TI untuk mendukung *digital branch*;
 - 8) perjanjian/ *draft* perjanjian kerjasama Bank dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);
 - 9) hasil analisis dan identifikasi risiko terhadap risiko yang melekat pada *digital branch*;

- 10) hasil analisis kesiapan penerapan manajemen risiko khususnya pengendalian pengamanan (*security control*) untuk memastikan terpenuhinya prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), keaslian (*authentication*), tidak dapat dipungkiri (*non repudiation*), ketersediaan (*availability*), pengendalian otorisasi dalam sistem dan aplikasi (*authorization of control*), pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*), serta pemeliharaan jejak audit (*maintenance of audit trails*);
 - 11) perjanjian/*draft* perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal layanan *digital branch* merupakan hasil kerjasama Bank dengan pihak ketiga, yang mencakup paling sedikit:
 - a) hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - b) perlindungan kerahasiaan data;
 - c) kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak terhadap perlindungan nasabah.
 - 12) hasil *assessment* terhadap kelayakan dan kinerja pihak ketiga dalam hal layanan *digital branch* merupakan hasil kerjasama Bank dengan pihak ketiga;
 - 13) hasil analisis aspek hukum;
 - 14) laporan hasil audit pihak independen terhadap kesiapan operasional *digital branch*;
 - 15) program perlindungan dan edukasi nasabah *digital branch*;
 - 16) kantor yang menjadi kantor cabang induk dari *digital branch*.
- d. Dalam rangka menilai kelengkapan dan pemenuhan persyaratan serta kesiapan operasional, OJK dapat melakukan pemeriksaan (*on-site visit*) ke lokasi *digital branch*.
- e. Bank mencatumkan jenis pada lokasi *digital branch* (contoh “Gerai Digital Bank XYZ”, atau “Kantor Kas Digital Bank XYZ”, atau “Kantor Cabang Pembantu Digital Bank XYZ”).
Bagi jenis *digital branch* “Gerai Digital”, Bank mencantumkan kesetaraan layanannya sesuai dengan layanan kantor lokasi keberadaan Gerai Digital (contoh Kantor Kas atau Kantor Cabang Pembantu).
- f. Bagi Bank yang telah mendapat persetujuan penyelenggaraan/pembukaan jenis *digital branch* berupa Gerai Digital dapat menyelenggarakan/membuka Gerai Digital berikutnya tanpa persetujuan terlebih dulu dari OJK, sepanjang:
- 1) tidak terdapat perubahan substansi data atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - 2) tercantum dalam RBB.
- g. Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tetap harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebagaimana diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No.32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan, dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

B. Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi

1. Dalam rangka penerapan manajemen risiko teknologi informasi untuk penyelenggaraan/pembukaan *digital branch*, Bank harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Pengamanan *logic*, Bank:

- 1) menerapkan prinsip *two factor authentication* pada saat pendaftaran/registrasi calon nasabah maupun pada saat transaksi.
- 2) menggunakan KTP-el sebagai basis data dan verifikasi calon nasabah.
- 3) menggunakan mesin pembaca KTP-el yang telah disertifikasi oleh badan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) menyimpan gambar/*image* KTP-el calon nasabah.
- 5) menyimpan informasi calon nasabah untuk penerapan program APU-PPT.
- 6) melakukan validasi beberapa data calon nasabah terhadap data kependudukan yang ada di Dukcapil.
- 7) menentukan batas toleransi kesalahan *input* verifikasi data.
- 8) menjaga kerahasiaan informasi pribadi nasabah atau calon nasabah saat proses pendaftaran, transaksi, maupun layanan lainnya.
- 9) memastikan seluruh perangkat dan aplikasi yang digunakan dalam *digital branch* telah memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.

b. Pengamanan fisik, Bank:

- 1) melakukan pengamanan terhadap seluruh sarana dan prasarana, seperti mesin pembaca KTP-el, terminal, dan kabel jaringan.
- 2) menggunakan perangkat elektronik yang bersifat *tempered proof*.
- 3) mengoperasikan kamera *Closed-Circuit Television* (CCTV) yang dapat meliputi seluruh area *digital branch* dan infrastruktur pendukung, serta menyimpan hasil rekaman kamera CCTV selama periode tertentu sesuai kebijakan Bank.

c. Pengendalian operasional, Bank:

- 1) menyediakan panduan, penjelasan, serta ilustrasi jenis dan cara penggunaan layanan pada *digital branch* sebagai bagian dari aspek edukasi dan perlindungan nasabah.
- 2) melakukan verifikasi serta meyakini keabsahan dan kesesuaian nomor telepon seluler yang didaftarkan nasabah, antara lain dengan mengirimkan kode *one time password* (OTP) ke nomor telepon seluler yang didaftarkan oleh nasabah.
- 3) menyediakan bukti transaksi dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak kepada nasabah.
- 4) menyediakan layanan notifikasi kepada nasabah untuk jenis transaksi tertentu sesuai dengan *risk-appetite* Bank atau kebutuhan nasabah.
- 5) memiliki metode pemantauan aktivitas *digital branch*, termasuk menyediakan sarana jejak (*audit trail*) dari sistem yang digunakan dalam mendukung penyelenggaraan *digital branch*.
- 6) memiliki mekanisme untuk memastikan pengamanan *log* pada mesin pembaca KTP-el.
- 7) menjaga keamanan dan kerahasiaan data *biometric*, dalam hal Bank merekam data *biometric* calon nasabah.

- 8) menyediakan fasilitas telepon pada *digital branch* untuk berkomunikasi dengan *call center*.
 - 9) memiliki fungsi dan prosedur untuk menangani pengaduan nasabah dan penyelesaian perselisihan terkait transaksi digital.
 - 10) memiliki *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang memadai untuk memastikan selalu tersedianya layanan pada *digital branch*.
 - 11) melakukan audit terhadap infrastruktur *digital branch* secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 12) memastikan bahwa pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank menerapkan pengendalian pengamanan yang memadai paling sedikit sesuai dengan *risk appetite* dan standar yang dimiliki oleh Bank, dalam hal layanan yang disediakan bank merupakan hasil kerjasama dan/atau produk pihak ketiga.
2. Tidak terdapat perubahan proses bisnis pada saat nasabah melakukan transaksi pasca pembukaan/registrasi nasabah Bank, yaitu tetap memperhatikan 2 (dua) dari 3 (tiga) faktor otentikasi.

C. Proses Bisnis Registrasi dan Pembukaan Rekening Nasabah

1. Calon nasabah harus memiliki KTP-el.
2. Bank harus menggunakan mesin pembaca KTP-el untuk membaca data KTP-el dengan validasi *biometric* sidik jari calon nasabah.
3. Bank memastikan validitas identitas calon nasabah dengan 2 (dua) faktor otentikasi yaitu *what you have* (KTP-el) dan *something you are* (*biometric* berupa sidik jari). Selain itu, Bank juga dapat melakukan validasi kebenaran identitas calon nasabah dengan menggunakan sarana elektronik seperti *video chat* (*video conference*) dengan pegawai Bank.
4. Bank harus melakukan verifikasi data calon nasabah dengan cara membandingkan data yang dibaca oleh mesin pembaca KTP-el dengan data yang diperoleh dari Dukcapil.
5. Calon nasabah melengkapi data atau informasi yang diperlukan sesuai dengan persyaratan dalam rangka penerapan program APU-PPT dan formulir elektronik (*e-form*) yang disediakan oleh Bank.
6. Bank dapat merekam data *biometric* calon nasabah untuk keperluan otentikasi transaksi di masa yang akan datang, sepanjang mendapat persetujuan dari calon nasabah.
7. Dalam hal calon nasabah telah menjadi nasabah pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lain, maka Bank dapat menggunakan hasil *Customer Due Dilligence* (CDD) yang telah dilakukan oleh LJK tersebut, sepanjang sesuai dengan persyaratan pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan program APU-PPT.
8. Persetujuan pembukaan rekening dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Bank sesuai dengan profil risiko calon nasabah.

Jakarta, 19 Desember 2016